



PEMKAB MUBA LUNCURKAN
RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH
TAHUN 2023

Berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 70 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mencakup laporan kinerja instansi Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2023, Tugas Pembantuan dan Tugas Umum Pemerintahan. LPPD diawali dengan menggambarkan kondisi geografis, demografi dan perekonomian di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023, dengan luas wilayah 14.265,96 Km² atau sekitar 15% dari luas Provinsi Sumatera Selatan terletak di antara 1,3° sampai dengan 4° Lintang Selatan dan 103° sampai dengan 105°45' Bujur Timur.

Penduduk Kabupaten Musi Banyuasin pada Tahun 2019 jumlahnya 586.875 Jiwa atau meningkat sebesar 2,61%, untuk Tahun 2020 jumlahnya 620.229 Jiwa atau bertambah sebesar 2,92%, untuk Tahun 2021 jumlahnya 651.861 Jiwa atau bertambah sebesar 4,97%, sedangkan pada Tahun 2022 jumlahnya 688.969 Jiwa atau bertambah sebesar 5,54% dan



terakhir pada Tahun 2023 kembali naik menjadi 707.290 Jiwa atau naik sebesar 2,62%.

Sedangkan jumlah ASN di Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2023 berjumlah 6.418 orang, yang terdiri dari : Perempuan 3.777 orang dan Laki-laki 2.641 orang.

1. Capaian Kinerja Makro

Indikator Kinerja Makro Kabupaten Musi Banyuasin dapat dijelaskan sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun N-1	Capaian Kinerja Tahun N	Perubahan
1.	Indeks Pembangunan Manusi	70,73	71,30	0,806%
2.	Angka Kemiskinan (%)	15,19	14,90	-1,909%
3.	Angka Pengangguran Terbuka (%)	4,40	2,58	-41,364%
4.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,27	4,51	5,621%
5.	Pendapatan Per Kapita ADHB (Juta Rupiah)	129,49	133,11	2,796%
6.	Indeks Gini (poin)	0,339	0,310	-8,555%



2. Ringkasan Capaian Kinerja

1). Urusan Pendidikan

A. Capaian Kinerja Outcome

No.	Indikator Kinerja Kunci Outcome	Capaian Kinerja
1.	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	77,94 %
2.	Tingkat Partisipasi warga negara usia 7 – 12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan dasar	109,16%
3.	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama.	100%
4.	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	1,12 %

B. Realisasi Belanja Urusan Pendidikan

C. Permasalahan yang dihadapi

Permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan urusan Pendidikan :

Kendala lain yang masih ditemui adalah keterbatasan kemampuan Sumber Daya Aparatur pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin.



2). Urusan Kesehatan

A. Capaian Kinerja Outcome

No.	Indikator Kinerja Kunci Outcome	Capaian Kinerja
1.	Rasio Daya tampung Rumah Sakit Rujukan	0,00042%
2.	Jumlah Rumah Sakit Rujukan Tingkat kabupaten Yang terakreditasi	100%
3.	Persentase ibu hamil mendapat pelayanan kesehatan ibu hamil	95,46 %
4.	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	94,07 %
5.	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	97,32 %
6.	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	99,36 %
7.	Persentase anak usia mendapat pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	98,53 %
8.	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100 %
9.	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	99,27 %
10.	Persentase penderita hipertensi yang mendapat kesehatan yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	99,96 %
11.	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	99,96 %
12.	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100 %
13.	Persentase orang terduga TBC mendapat pelayanan TBC sesuai standar	109,53 %



No.	Indikator Kinerja Kunci Outcome	Capaian Kinerja
14.	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	109,55 %

B. Realisasi Belanja Urusan Kesehatan

C. Permasalahan yang dihadapi

Permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan urusan Kesehatan :

1. Adanya efisiensi anggaran;
2. Kekurangan waktu dan SDM untuk kegiatan di Luar Kantor;
3. Pembekuan Komponen Pengadaan Kartird TCM Selanjutnya Berdasarkan surat Direktur dan Kesehatan Ibu dan Anak Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kemenkes RI Nomor GM.01.02/B.III/2725/2023 perihal percepatan Pelaksanaan PMT Lokal Melalui Peralihan Dana Katrid TCM Bersumber DAK Non Fisik Tahun 2023
4. Estimasi biaya kebutuhan perbaikan instalasi tegangan listrik yang di buat oleh PLN tidak sesuai dengan kebutuhan anggaran pada waktu survey persiapan proses pengadaan barang dan jasa, estimasi biaya yang dibuat PLN 350 s/d 500 jt pada saat survey persiapan proses pada saat pengadaan perbaikan tegangan listrik hasil estimasi biaya yang di buat oleh tenaga tehnis dari PUPR sekitar 1 M karena di dalam RAB hasil survey PLN tidak memasukkan kebutuhan pengadaan tiang listrik



sebanyak 5 s/d 8 unit dan kebutuhan kabel PLN tegangan menengah sepanjang 1500 Meter sehingga dana yg dianggarkan oleh dinkes pada APBDP sebesar Rp. 539.101.006,- tidak mencukupi untuk mengatasi perbaikan tegangan listrik Pkm Air Balui.

3). Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

A. Capaian Kinerja Outcome

No.	Indikator Kinerja Kunci Outcome	Capaian Kinerja
1.	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	7,64%
2.	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi dan akresi yang terlindungi oleh infrastuktur pengaman pantai di WS kewenangan Kabupaten	0 % Aspek Geografis Kab. Muba tidak mempunyai pantai
3.	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	0%
4.	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	92,37%
5.	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	82,45%
6.	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	100%



No.	Indikator Kinerja Kunci Outcome	Capaian Kinerja
7.	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	0%
8.	Rasio tenaga operator/ teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	0%
9.	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	0 %

B. Realisasi Belanja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

C. Permasalahan yang dihadapi

Permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang :

1. Alokasi anggaran belum mampu memenuhi semua tuntutan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Musi Banyuasin
2. Keterbatasan kemampuan dan ketrampilan sumber daya manusia yang dimiliki.
3. Sebagai dinas teknis, masih terbatasnya ketersediaan personil yang mengikuti pendidikan teknis maupun keahlian
4. Minimnya tenaga operasional dan pemeliharaan di lapangan yang berada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin



5. Kurangnya kesadaran masyarakat pengguna jalan terhadap kemampuan jalan dalam menerima beban muatan
6. Optimalisasi sarana dan prasarana penunjang yang belum optimal
7. Pemahaman terhadap etika birokrasi yang kurang, misalnya ketaatan dan kedisiplinan.

4). Urusan Permukiman Rakyat

A. Capaian Kinerja Outcome

No.	Indikator Kinerja Kunci Outcome	Capaian Kinerja
1.	Hunian untuk penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	0 %
2.	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	0 %
3.	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	7,28 %
4.	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	18,90 %
5.	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	0,4 %

B. Realisasi Belanja Urusan Permukiman Rakyat

C. Permasalahan yang dihadapi

Permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan urusan Permukiman Rakyat :



1. Keterbatasan sumber daya aparatur yang berkualifikasi teknis di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dan managerial baik secara kualitas atau kuantitas;
2. Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang kelancaran tugas aparatur baik pelayanan administrasi perkantoran maupun mobilitas dalam pengawasan dan evaluasi kegiatan fisik di lapangan;
3. Terbatasnya pengetahuan aparatur tentang peraturan dan penjabaran teknis kegiatan;
4. belum lengkapnya database terkait perumahan;
5. Belum optimalnya penanganan rumah tidak layak huni di kawasan kumuh;
6. Pertambahan penduduk membuat kebutuhan rumah akan terus meningkat, sehingga ketersediaan lahan untuk pembangunan perumahan semakin berkurang yang berpotensi munculnya kawasan kumuh baru akibat aktivitas masyarakat.

5). Urusan Trantibumlinmas

A. Capaian Kinerja Outcome

No.	Indikator Kinerja Kunci Outcome	Capaian Kinerja
1.	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100 %
2.	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100 %



No.	Indikator Kinerja Kunci Outcome	Capaian Kinerja
3.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%
4.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%
5.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi	100%
6.	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100 %
7.	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	100 %

B. Realisasi Belanja Urusan Trantibumlinmas

C. Permasalahan yang dihadapi

Permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan urusan Trantibumlinmas :

Dalam melaksanakan urusan Trantibumlinmas dapat disimpulkan secara umum kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Musi Banyuasin terlaksana dengan baik sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, untuk mencapai target RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin 2023-2026. Adapun langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja yaitu, dengan menjadikan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023 ini sebagai acuan untuk melaksanakan program dan kegiatan di tahun yang akan datang



sehingga, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Musi Banyuasin dapat melaksanakan tugas lebih baik lagi dari tahun sebelumnya sesuai dengan tupoksi yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 80 Tahun 2016, sepanjang peraturan tersebut belum diubah guna untuk tercapainya Visi dan Misi kebijakan pembangunan potensi unggulan secara kontinyu dan berkesinambungan untuk tercapainya sasaran strategis.

6). Urusan Sosial

A. Capaian Kinerja Outcome

No.	Indikator Kinerja Kunci Outcome	Capaian Kinerja
1.	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	100 %
2.	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100 %

B. Realisasi Belanja Urusan Sosial

C. Permasalahan yang dihadapi

Untuk 4 program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota, Program Pemberdayaan Sosial, Program Rehabilitasi Sosial dan Program Penanganan Bencana dapat berjalan



dengan baik dengan rata-rata realisasi anggarannya diatas 90%.

Untuk 1 Program yaitu Program Perlindungan Dan Jaminan dengan 2 kegiatan yaitu : Pengelolaan Data Fakir Miskin cakupan daerah kabupaten kota tidak ada kendala dalam pelaksanaannya. Untuk kegiatan fasilitas bantuan sosial kesejahteraan keluarga Pelaksanaan bantuan bantu umak dapat kami jelaskan bahwa :

1. Jumlah KPM SK Bupati NO : 347/KPTS-DINSOS/2023 16.406 Jiwa atau 9.491 KK
2. Hasil rapat koordinasi TGL 20 Juli 2023 bersama pemerintah kecamatan dan desa terjadi sanggahan dan dibuat SK Bupati Perubahan NO : 522/KPTS-DINSOS/2023 dengan jumlah KPM menjadi 12.661 jiwa atau 7.248 KK
3. Setelah buku selesai dicetak dan buku didistribusikan di lapangan, terjadi penyanggahan 1.504 KK atau 2.419 Jiwa dengan alasan dengan alasan menolak, tidak mau ditempel sticker maupun alasan waktu yang diberikan pada masa sanggahan tidak mencukupi. Atas hal tersebut, Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin sudah mengembalikan ke Kas Daerah.



3. HASIL EPPD DAN OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN SEBELUMNYA

1. Hasil EPPD Tahun sebelumnya

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin mendapatkan skor 2,9606 dengan status Kinerja Sedang. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1109 Tahun 2023 tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Secara Nasional Tahun 2023 Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Dan Kabupaten / Kota Tahun 2022.

2. Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun sebelumnya berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 06.A/LHP/XVIII.PLG/03/2022 tanggal 10 Maret 2022 mendapatkan Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Hal tersebut dikarenakan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.



4. INOVASI DAERAH

Daftar Penerapan Inovasi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023

NO.	INSTANSI/BADAN/OPD	NAMA INOVASI	TAHAPAN INOVASI
1.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin	ADMINISTRASI KELADI (Administrasi Kependudukan Langsung Jadi)	Penerapan
2.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Musi Banyuasin	Pembayaran via CMS untuk Pengelolaan Keuangan Desa di Kab. Muba	Penerapan
3.	Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin	INOVASI KOIN FOKER (Konsultasi Online Obat Program dan Informasi Obat Dengan Stiker) di UPT Puskesmas Lumpatan	Penerapan
4.	Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin	Motor OGOL (Pelayanan informasi dibidang Promosi Kesehatan secara berulang) di UPT Puskesmas Tanah Abang	Penerapan
5.	Kecamatan Batanghari Leko	"BALADAS" (Bayi lahir dapat Akte Kelahiran sekaligus) "SMART" (Selesai SMA/SMK Remaja dapat KTP-el) Kecamatan Batanghari Leko	Penerapan
6.	Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu	NGAPE MITU (Pelayanan Digitalisasi Pasien Medical Check Up Satu Pintu)	Penerapan
7.	Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Banyuasin	SIAPPBUN (Sistem Aplikasi Pelaporan Pelaku Usaha Perkebunan)	Penerapan
8.	Kecamatan Bayung Lencir	Tamasya Suku Anak Dalam (SAD)	Penerapan
9.	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Musi Banyuasin	Teh Daun Gambir	Penerapan
10.	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Musi Banyuasin	Permen Herbal Gambir	Penerapan